

ABSTRAK

Aprilia Maharani. 2026. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg). Skripsi. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan korban meninggal dunia menjadi persoalan hukum yang memerlukan penanganan secara cermat. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai pelaku, tetapi juga menyangkut pemenuhan keadilan bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai seluruh fakta hukum sebelum menjatuhkan putusan, termasuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual hingga menyebabkan kematian korban, sekaligus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian *pertama* menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam proses tersebut, hakim memperhatikan alat bukti yang diajukan, fakta yang terungkap selama persidangan, usia serta kondisi psikologis pelaku, dan dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang berujung pada meninggalnya korban. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dengan tuntutan keadilan bagi korban. *Kedua* anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena seluruh unsur tindak pidana telah terbukti, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan, serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Penerapan pertanggungjawaban tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Kekerasan Seksual, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Aprilia Maharani. 2026. *Analysis of Juvenile Criminal Liability as Perpetrators of Sexual Violence Resulting in Death (Study of the Decision of the Palembang District Court Number 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg)*. Undergraduate Skripsi. Law Department, Universitas PGRI Madiun, FH, Universitas PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Sexual violence committed by a child that results in the victim's death presents a challenging legal issue, as it requires balancing two equally important interests: safeguarding the rights of the child offender and ensuring justice for the victim. In resolving such cases, judges must carefully evaluate both legal and non-legal considerations before imposing a sentence, particularly when determining the child's criminal liability. Accordingly, this study examines the judicial considerations underlying the imposition of criminal sanctions on child offenders in cases of sexual violence causing death, as well as the legal basis for holding them criminally accountable. This research employs a normative legal method using both the statutory approach and the case approach. The findings indicate that judges base their decisions on juridical, philosophical, and sociological considerations. In reaching a verdict, judges assess the evidence presented during the trial, the facts established in court, the offender's age and personal circumstances, and the severity of the consequences suffered by the victim. These considerations demonstrate an effort to balance the child's legal protection with the victim's right to justice. Furthermore, the study concludes that a child may be held criminally liable when all elements of the offense have been proven, the child possesses the capacity for criminal responsibility, fault has been established, and no legal grounds for justification or excuse exist. Such accountability is consistent with the principles of the Juvenile Criminal Justice System, which emphasize rehabilitation, guidance, and the protection of the child's best interests.

Keywords: *Criminal Responsibility of Children, Sexual Violence, Judge's Considerations.*